

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

**PENGARUH PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK(NPWP) DALAM PENERIMAAN PAJAK**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md)
Jurusan Manajemen Perpajakan**



Oleh :

IIS SEPTIA RAHMAYANI

NPM : 1505190034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul '**Pengaruh pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Penerimaan Pajak**'. Laporan praktek kerja lapangan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Dipolma III(D3) pada jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan laporan praktek kerja dilapangan ini tidak lepas dari bantuan bebrbagai pihak .oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada

1. Bapak **H.Januri,SE,MM,MSi** ,selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumataera Utara
2. Bapak **Ade Gunawan ,SE,M.Si** , Selaku PD1
3. Bapak **Dr.Hasrudy Tanjung ,SE,M.Si** selaku PD3
4. Ibu **Elizar Sinambela,SE.M.Si** selaku ketua Jurusan Manajemen Perpajakan
5. Bapak **Riva Ubar Harahap,SE,Ak.M.Si,CA,CPAi** selaku sekertaris Jurusan Manajemen Perpajakan
6. Ibu **Zulia Hanum SE,M.Si** sebagai Dosen Pembimbing yang memberi arahan bimbingan selama penulis menjalankan Praktek Pengalaman Lapangan
7. Ibu **Zulia Hanum SE,M.Si** sebagai Dosen Pembimbing yang memberi arahan bimbingan selama penulis menjalankan Praktek Pengalaman Lapangan

8. Bapak **Jasman Syarifudin** selaku Dosen Panesahat Akademik (PA) Manajemen Perpajakan
9. Kedua orangtua saya tercinta ,Bapak **Rubama** dan Ibu **Sana'ah** yang telah meberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang tak terhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya Laporan Praktek Kerja Lapangan ini
10. Kakak ku tercinta **Ade novi ruenciana** dan adik ku **Nabila nanda ariqah** yang memberikan kasih sayang serta dukungannya selama ini
11. Temen spesial saya **Ryansyah Ramadhana** yang selalu mendukung saya dan mensupport saya selama ini dalam hal apapun termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir saya
12. Pihak **Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan** yang telah bersedia untuk dijadikan tempat Praketek Kerja Lapangan
13. Bapak Mulyadi selaku Kepala Kantor, Ibu Evi Panjaitan selaku Kepala Sub Bagian umum, Bapak Edi beserta jajarannya di Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan.
14. Teristimewa untuk sahabat penulis , teman-teman dari **Manajemen Perpajakan Siang** dan teman- teman seperjuangan dalam menyelesaikan laporan ini.

Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2018
Penulis

IIS SEPTIA R
NPM : 1505190034

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PENGESAHAN

LEMBARAN BERITA ACARA

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang PPL	1
B. Ruang Lingkup PPL.....	1
C. Tujuan dan Manfaat PPL	2
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAAN	5
A. DESKRIPSI	5
1. KAJIAN TEORI DAN DESKRIPSI DATA	5
a. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.....	5
b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan	6
c. Wilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan	7
d. Makna dan Lambang DJP	8
e. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan	9
f. Deskripsi dan Aktivitas Kerja KPP Pratama Medan Belawan	11
2. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN ..	17
a. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalan Lapangan	17
b. Prosedur kerja	17
c. Kendala Kerja dan pemecahan Masalah	19

B. PEMBAHASAAN	20
1. PENGARUH PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DALAM PENERIMAAN PAJAK.....	20
a. Pengertian pajak.....	20
b. Kepemilikan NPWP	21
c. Fungsi dan Guna NPWP	22
d. Yang Menjadi Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Meperoleh NPWP	23
e. Pendaftaran dan Penerimaan NPWP.....	24
f. Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak penghasian(PPh)	26
g. Penerimaan Pajak.....	27
BAB III PENUTUP.....	29
A. Simpulan	29
B. Saran-Saran	29
DAFTAR PUSTAKA 30	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang PPL

Program Pengalaman lapangan (PPL) merupakan bagian inti kurikulum yang dilaksanakan oleh mahasiswa calon guru atau tenaga pendidik, baik latihan mengajar maupun tugas kependidikan lainnya secara terbimbing dan terpadu sebagai pesyaratan profesi kegunaan PPL merupakan muara dari seluruh program pendidikan.

PPL yang dapat dilaksanakan dengan latihan kerja (Job Training) bagi calon pegawai atau staff perusahaan. Hakikat dari semua pelatihan tersebut adalah mempersiapkan calon penganban tugas menjadi profesional dalam bidang yang ditekuninya nanti. Dipandang dari susut kurikulum, PPL merupakan mata kuliah proses belajar mengajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan penjabatan guru. PPL sengaja dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa PPL, agar memiliki atau menguasai kemampuan keguruan terpadu yang secara utuh, sehingga setelah mereka menjadi guru yang dapat bertanggung jawab atas tugas secara profesional. Setiap langkah dalam komponen pelatihan tersebut mengacu pada teori yang telah dipelajari menuju kepada praktek pelaksanaan tugas atau berdasarkan efektivitas dan ketetapannya dalam praktek

B. Ruang lingkup

Pelaksanaan praktek pengalaman lapangan (PPL) adalah bentuk kerja yang dipraktikkan langsung oleh mahasiswa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama.

Pada kesempatan ini penulis melaksanakan praktek pengalaman kerja di lapangan di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Medan Belawan sejak tanggal 01 febuari 2018 s/d 28 febuari 2018, Penulis diminta melangsungkan praktek pengalaman kerja lapangan dengan ditetapkan dibebagai tempat yakni Sub, Bagian Umum, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Fungsional, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WAKSON), Fungsional Pemeriksaan Pajak, adapun masing masing tempat tersebut diberikan kesempatan yakni Seksi Pemeriksaan .

C. Tujuan dnn manfaat PPKL

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan pelaksanaan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) yang bertujuan untuk memperoleh wawasan dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama melakukan PPKL, agar setiap mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan yang dipeoleh pada pekuliahan serta menerapkannya pada dunia kerja yang nyata . hal ini diharapkan dapat menjadi bekal dan pengalaman yang sangat penting dan bermanfaat pada masa yang akan datang .

Selain ini prkatek pengalaman kerja lapangan juga berguna dalam melatih diri guna bekerja dengan disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam suatu tugas, dengan pelaksanaan PPKL ini mahasiswa mengetahui sejauh mana perbedaan Antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada didunia kerja sebenarnya .

Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PPKL akan menambah wawasan dan percaya diri bagi mahasiswa dalam dunia kerja untuk menjalankan kerja sama yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Berikut adalah tujuan dari pelaksanaan PPKL:

1. Sebagai sarana perbandingan akurat Antara ilmu dan keterampilan yang diterima selama pendidikan dengan kenyataan yang diperoleh dalam lingkungan kerja.
2. Mengantisipikasi kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja sebagai pengguna mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Sebagai salah satu untuk memenuhi syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III(D3) Fakultas Ekonomi Manajemen Perpajakan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Mempersiapkan diri meningkatkan kemampuan diri mahasiswa sebelum menghadapi dunia kerja, baik secara pengetahuan teoritis maupun praktek di lapangan.
5. Melatih mahasiswa untuk dapat bekerjasama dan meningkatkan pergaulan dengan para pekerja profesional sebagaimana diharapkan
6. Melatih mahasiswa dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja sehingga diharapkan nantinya tidak kaku lagi , baik dalam berkomunikasi ,berpenampilan serta dalam bertingkah laku untuk menciptakan suasana kerja lebih baik

Manfaat Praktek Pengalaman Kerja Lapangan adalah sebagai berikut

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja sebenarnya bagi mahasiswa
2. Mahasiswa dapat memahami gambaran tentang perusahaan dan instansi pemerintah
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga mengenai runag lingkup kerja professional.
4. Mahasiswa mendapatkan penanaman mengenai prosedur-prosedur diterapkan dalam perusahaan atau instansi pemerintah .
5. Mahasiswa secara tidak langsung membantu pekerja pegawai didalam perusahaan dan instansi pemerintah tempat praktek kerja lapangan

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori dan Deskripsi data

1. Sejarah umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. Dengan diadakannya modernisasi perpajakan oleh pihak Kementerian Keuangan maka KPP Pratama Medan Belawan tidak lagi memungut PBB dan BPHTB. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib

pajak di bidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi KPP pratama Medan Belawan

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktikpraktik “good governance” pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. VISI

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dalam rangka mensosialisasikan sasaran pencapaian penerimaan pajak, diperlukan sarana pendukung yang harus di persiapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan secara lebih handal. Beberapa sarana pendukung tersebut antara lain adalah peningkatan etika dan moral aparat, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi yang tepat, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dan perbaikan sistem informasi yang akurat.

b. MISI

1. FISKAL

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2. EKONOMI

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

3. POLITIK

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. KELEMBAGAAN

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Medan Labuhan
- b. Kecamatan Medan Marelan
- c. Kecamatan Medan Deli
- d. Kecamatan Medan Belawan

4. Makna dan Lambangan DJP

Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Lambang Kementerian Keuangan

a. Keterangan umum :

Motto : Negara dan Rakca

Bentuk : Segitiga dengan ukuran 5 cm dan tinggi 7 cm

Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuning, emas putih, dan hijau

b. Makna

1. Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 4 dan 4 buah berlingkung 5, berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
3. Gada berwarna emas melambangkandaya upaya menghimpun, mengerahkan dan mengamankan keuangan Negara.

4. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

c. Arti Keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambing tersebut sesuai dengan motto “Negara dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tuas Kementrian Keuangan.

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Di setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggota. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur “line and staff organization” atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional. Struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan berdasarkan fungsi bukan jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh seorang kepala, yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. Organisasi yang berada di KPP Pratama Medan Belawan bertujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan teratur dan penuh tanggung jawab,

sehingga tujuan yang di inginkan dapat tercapai dengan hasil yang baik dan maksimal. Berikut struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

a. Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan



Gambar II : Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (2018)

6. Deskripsi dan Aktivitas Kerja KPP Pratama Medan Belawan

1. Kepala KPP (Kepala Kantor) Tugas Kepala

KPP:

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- g. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan, mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan, mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum:

- a. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan pengiriman surat – surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
- b. Mendistribusikan surat – surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat- surat keluar kepada instansi yang terkait.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
- d. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin kepada pegawai.
- e. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas Seksi PDI :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
- b. Penyajian informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- g. Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan :

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.]
- c. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Memberikan penyuluhan perpajakan.
- e. Melaksanakan registrasi wajib pajak.
- f. Memungut fiskal luar negeri di pelabuhan Belawan.

5. Seksi Penagihan

Tugas Seksi Penagihan:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, memproses permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
- b. Melakukan Penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan.
- c. Melakukan Penyitaan, usulan lelang dan Penagihan lainnya.

Di seksi penagihan terdapat beberapa orang Juru Sita Pajak yang telah mendapat pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak.

Adapun tugas Juru Sita Pajak :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS).
- b. Memberitahukan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan (SPMP).

- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus memakai pakaian Juru Sita Pajak dan memperlihatkan kartu tanda pengenal kepada penanggung pajak

6. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi :

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- b. Pendataan obyek dan subyek pajak.
- c. Penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi :

- a. Melakukan Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak terdaftar.
- b. Memberikan Bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan Profil wajib pajak.
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak.

- e. Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat seksi pengawasan dan konsultasi dibagi berdasarkan domisili / tempat tinggal / wilayah tempat wajib pajak terdaftar.

1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I)

- a. Kelurahan Kampung Besar.
- b. Kelurahan Martubung.
- c. Kelurahan Sei Mati
- d. Kelurahan Pekan Labuhan.
- e. Kelurahan Tangkahan.
- f. Kelurahan Nelayan Indah.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II) Kasi :

- a. Kelurahan Labuhan Deli
- b. Kelurahan Rengas Pulau I.
- c. Kelurahan Terjun.
- d. Kelurahan Tanah 600.
- e. Kelurahan Paya Pasir.
- f. Kelurahan Rengas Pulau II
- g. Mabar (200 Besar)

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON III)

- a. Kelurahan Tanjung Mulia.
- b. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
- c. Kelurahan Mabar.

d. Kelurahan Kota Bangun.

e. Kelurahan Titi Papan.

f. Kelurahan Mabar Hilir.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON IV)

a. Kelurahan Sicanang.

b. Kelurahan Belawan Bahari.

c. Kelurahan Belawan Bahagia.

d. Kelurahan Belawan I.

e. Kelurahan Belawan II.

f. Kelurahan Bagan Deli

Cat: WP bendaharawan Berada di Pengawasan Seksi Wakson IV

9. Fungsional Pemeriksa dan Penilai Pejabat

Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

B. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN KERJA

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan kerja

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah salah satu Pengalaman yang mendatangkan banyak ilmu bagi penulis di KPP Pratma Medan Belawan .Berdasarkan persetujuan dari KPP Medan Belawan ,maka penulis dapat melaksanakan Program Pengalaman Lapangan Terhitung daei 1 Febuari 2018 sampai dengan 28 febuari 2018 sedangkan jam kerja dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di KPP Pratama Medan Belawan adalah sama dengan jam kerja para pegawai yaitu mulai 07:30 WIB sampai 17:00 WIB . penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan ditempatkan di Seksi Pemeriksaan .

Adapun beberapa jenis dan bentuk kegiatan penulis selama Program Pengalaman Lapangan berlangsung secara berikut:

1. Menarsipkan data yang sudar diperiksa
2. Mencari berkas di jabu pari
3. Mendsitribusikan surat dari pemeriksakan ke bagian pelayanan

b.prosedur kerja

dalam melaksakan prosedur kegiatan kerja Program Pengalaman lapangan Penulis harus mengikuti segala peraturan peraturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan di Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Seperti halnya pegawai pegawai lainnya . Penulis ditetapkan dibagian Pemeriksaan maka dari itu Penulis diarahkan untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang telah disebutkan diatas.

Disini peunulis akan menjelaskan maksud prosedur kerja kegiatan penulis Selama PPL berlangsung di KPP Pratama Medan Belawan .prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut

1. mengarispskan data yang telah di periksa

peosedur kerjanya :

yang dilakukan pertama melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan sudah bener sesuai prosedur pemeriksaan . berkas yang sudah di periksa selanjutnya di buku rumahkan ,setelah itu di catat sesuai tanggal pelaporan dan diarsipkan sesuai tahun pajak dilaporkan

2. Mencari berkas yang ada dijabu pari

Prosedur kerjanya

Pada saat pencarian berkas yang sudah disimpan di ruang khusus berkas yang telah di periksa disebut jabu pari .,sebelum pencarian berkas terlebih dahulu print out berkas yang akan di cari,sebab berkas yang jabu pari sudah disusun dan diurut berdasarkan data yang sudah diarsipkan

3. Mendistribusikan surat

Setelah selesai menulis surat yang dibuat selanjutnya untuk dikirimkan kebagian yang dituju dengan adanya surat pengantar dan di tandatangai oleh penerima surat dibagian tersebut

c.Kendala Kerja dan Pemesalahan kerja

Kendala Kerja

kendala yang saya alami dalam proses Program Pengalam Lapangan Kerja

1. Tidak ada berkas yang diperiksa dikarenakan berkas WP belum masuk
2. Pada saat penomoran di rumah berkas sering double
3. Berkas WP yang Tidak lengkap

Pemecahaan Masalah

Pemecahaan Masalah yang harus saaya lakukan

1. Selama berkas WP belum masuk ke bagian Pemeriksaan Penulis memeriksa berkas yang sudah diperiksa yang belum dilengkapi wp
2. Pada saat penomoran sering terjadi double harus diperiksa ke buku catatan rumah berkas nomor yang sebenarnya
3. Jika Berkas WP tidak lengkap maka Pemeriksaa menelpon WP untuk melengkapi Berkas yang tidak lengkap

C. PEMBAHASAN

1. PENGARUH PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DALAM PENERIMAAN PAJAK

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama . Semakin hari peranan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/Negara semakin besar.Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Berpedoman pada APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dana sumber pokok,yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri misalnya penjualan luar negeri dan hibah (grant) ,sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri,pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri,.Bagi kantor pelayanan pajak.penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Pemhasilan (PPh),Pajak Pertambahan Nilah (PPN) dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat Kepathuan Wajib pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Sebelumnya mereka harus memiliki NPWP sebagi mutlak yakni identitas .Wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibab perpajakannya . Wajib pajak dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan dengan baik

b. Kepemilikan NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan identitas wajib pajak dalam system administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam adimsitrasi perpajakannya yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya . Setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persayatan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).NPWP terdiri dari 15 digit,yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya Merupakan Kode Administrasi Perpajakanya . yaitu sebagai berikut

- 2 digit pertama merupakan kepala nomor
- 6 digit merupakan kode administrasi Wajib Pajak
- 1 digit merupakam nomor cek digit
- 3 digit merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak
- 3 digit merupakan kode banyaknya cabang

Kepala Nomor:

- 00 untuk Bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- 01 Wajib Pajak Badan
- 02 dan 03 cadangan
- 04 dan 06 Wajib Pajak Orang Pribadi
- 05 Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil,TNI,Polri

Yang wajib mempunyai NPWP adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama satu tahun dan semua badan usaha .Belum lama ini Direktorat Jendral Pajak mencanangkan target peningkatan NPWP puluhan persen untuk menunjang penghasilan Negara dari sector Pajak .

Menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya ,sehingga penerimaan penghasilan pajak akan semakin efektif

c. Fungsi dan Guna NPWP

fungsi NPWP adalah sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak , oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan adminstrasi perpajakan. Guna NPWP adalah untuk dicantumkan dalam dokumen/formulir perpajakan yang tercantum kolom NPWP seperti dalam Surat

Pemberitahuan , Surat Setoran Pajak,Bukti Potong/pemungut pajak,Surat menyurat dan sebagainya.

Untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan disini dalam mengisi formulir guna mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi Pemerintah,dokumen imigrasi,ijin perdagangan,PEB,telepon,Listrik,kredit bank,dokumen badan hukum dan lainnya.

d. Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Meperoleh NPWP

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Badan
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang berjumlah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun
4. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dan mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP
5. Bendaharawan sebagai Pemotong/Pemungut Pajak
6. Joint Operation
7. Sebagai Pemotong/Pemungut
8. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarakan perjanjian pemesihan penghasilan atau harta
9. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat

10. Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

e. Pendaftaran dan penerimaan NPWP

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan atau Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing.
2. Untuk Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - a. Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing
 - b. Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak
3. Untuk WP Badan

- a. Fotocopy akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan penunjuk dari kantor pusat BUT (Bentuk Usaha Tetap)
 - b. Fotokopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/ domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing dari salah satu pengurus aktif.
 - c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah satu pengurus aktif
4. Untuk bendahara sebagai pemungut/pemotong
 - a. Fotocopy KTP bendahara
 - b. Fotocopy surat penunjuk sebagai bendahara
 5. Wajib pajak dengan status cabang,orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita tidak kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotocopy surat keterangan terdaftar kantor pusat domisili/suami
 6. Untuk WP orang pribadi atau WP Badan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,persyaratannya tambahan yang diminta Antara lain sertifikat tanah dan/atau bangunan (bila tempat usahanya bukan miliknya). SIUP dan keterangan domisili dari pengelola Gedung/Kelurahan
 7. Pengukuhan pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut
 8. Khusus wanita kawin dapat mendaftarkan diri memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya atas nama sendiri dengan persyaratan sesuai kondisi dari wanita tersebut
 9. Apabila peemohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi surat kuasa khusus

Pendaftaran NPWP dan PKP melalui Elektronik (*Elektronik Registration*) Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> .Wajib pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk memperoleh NPWP.

Jangka waktu penyelesaian NPWP paling lamabat 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan . SKT,NPWP dan *starterkit* dikirim melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kuriri jika WP memerlukan NPWP segera,petugas pendaftaran dapat meberikan fotokopi SKT,fotokopi NPWP dan *starterkit* kepada WP. Dalam hal NPWP dan SKT kembali pos,WP diusulkan NE(*non efektif*)

f. Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Untuk meningkatkan penerimaan Negara tersebut pada pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakanya maupun dalam bidang lainnya. Salah satunya dibidang pajaknya adalah dalam hal pembayaran pajak.

Dalam hal ini pemerintah melalukannya melalui kegiatan ekstenfikasi yang bertujuan penambahan wajib pajak dengan cara pemberian NPWP ,menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak akan semakin efektif.

Peningkatan jumlah kepemilikan NPWP tersebut akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak jika didukung dengan tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

g. Penrimaan Pajak

Penerimaan Negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu bertumbuh besar. Pengeluaran untuk membiayai belanja Negara yang semakin lama semakin bertambah besar tersebut diperlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin relative sulit untuk diharapkan. Hal ini berarti bahwa semua Pmebelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan Negara , dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan bukan pajak yaitu Antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (Migas), pelayanan oleh pemerintah, pengolahan kekayaan Negara dan lain lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan –penerimaan tersebut terhadap factor eksternal, oleh karena itu satu satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sector perpajakannya. Begitu besarnya peranan sector perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara , maka dibutuhkan kedadaran suluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memeperhatikan azaz keadilan, kepastian dan kenyamanan.

Dalam UUD 1945, pajak diatur dalam pasal 23A yang menyebutkan bahwa :”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”

Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan Negara. peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban social Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sector perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 hingga saat ini , dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *self assessment system*. Hasil dari reformasi perpajakan yang dilakukan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan setiap tahunnya. Pada awal reformasi perpajakan tahun (1983), peran pajak bagi Negara melalui kontribusi si APBN masih dibawah 20% pertahun. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, peranannya meningkat terus menjadi diatas 20% hingga mencapai 75% tiap tahun. Oleh karena itu, peranan pemerintah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Mengingat porsi Pajak Penghasilan terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan pajak lainnya

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan NPWP dalam penerimaan pajak . Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan di bab selanjutnya,bahwa penerimaan pajak tergantung pada kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya.
2. Penerimaan Wajib Pajak baru sangat berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Semakin banyak yang sadar dan mendaftarkan dirinya ke Kantor Pajak maka semakin banyak pula penerimaan pajaknya.Ketika banyak penerimaan pajak semakin cepat Target Direktorat Jendral Pajak tercapai

B. Saran –saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan dari laporan yang ditunjukkan bahwa prosuder organisasi dan strategi organisasi tidak terpengaruh pada kesadaran WP dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru,maka dari itu semua yang bertugas harus lebih giat dan kerja keras dalam bersosialisasi kepada calon wajib pajak yang masih buta akan pengetahuan dan pentingnya pajak bagi kelangusng negara kita sendiri .
2. Meningkatkan dalam pelayanan yang optimal selalu berperan aktif ketika wajib pajak ingin menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Pancawati Hardiningsih,2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak

Rony Gunawan,2012. Pengaruh jumlah Kepemilikan NPWP,pelaporan SSP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan WP badan pada KPP Pratama karanganyar. *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret surakarta Tahun 2012*

www.googleskuler.com

www.pajak.go.id